

ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Aditya Ramadhan Sriparno¹
Maria M. Ratna Sari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: aditya.ramadhans94@gmail.com/ telp: +6283114357531

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan juga tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan untuk periode waktu 2009-2013. penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pajak daerah merupakan komponen pendapatan utama dalam pendapatan asli daerah yang mencapai rata-rata 72% setiap tahunnya. Dan disusul oleh retribusi daerah yang berkontribusi rata-rata 8% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah kota Denpasar bila dirata-ratakan selama tahun anggaran 2009-2013 sebesar 121.45% dengan kriteria penilaian sangat Efektif. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Denpasar selama periode tahun anggaran 2009-2013 adalah 64% dengan kriteria penilaian Sangat baik.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the contribution of local taxes and retribution on revenue as well as the level of effectiveness and Regional Financial Independence the government of Denpasar. This research was conducted for the period of 2009-2013. This research is a quantitative descriptive research. Based on the analysis determine that local taxes are the main revenue component in local revenues which reached an average of 72% annually and followed by the retribution which contribute an average of 8% annually. The level of effectiveness of local government revenue Denpasar when averaged over the 2009-2013 fiscal year amounted to 121.45% with a very effective assessment criteria. The ratio of the level of financial independence Denpasar city area during the period of the fiscal year 2009-2013 was 64% with very good assesment criteria.

Keywords: Local Tax, Retribusion, Financial Independency, Financial Effectiveness

PENDAHULUAN

Kepemimpinan seseorang berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil semasa kepemimpinan yang dijalankan. Pada era 90-an Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, dan sejak tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan pusat tersebut menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah.

Menyangkut hal tersebut, pemerintah mengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2004. Dalam kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Public Service*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan,

serta pembiayaannya. Bila suatu daerah melakukan pembangunan maka akan bermanfaat bagi daerah diantaranya: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, mendorong perkembangan perekonomian daerah, mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong kegiatan investasi.

Pulau Bali sebagai pusat destinasi pariwisata di Indonesia memiliki pemasukan yang besar dari sektor pariwisata yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Dan jika dilihat dari pendapatannya pulau Bali Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas target selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2008 sebesar 120,08 persen dari target, tahun 2010 sebesar 115,43 persen, dan tahun 2012 sebesar 106,91 persen, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD Provinsi Bali
Tahun 2008 – 2012

No	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH
1	2	3	4	5	6= 4-3
1	2008	1,388,534,527,780.00	1,667,388,444,290.84	120.08	278,853,916,510.84
2	2009	1,661,108,445,333.00	1,905,128,257,667.54	114.69	244,019,812,334.54
3	2010	1,938,657,385,866.00	2,237,707,339,297.23	115.43	299,049,953,431.23
4	2011	2,395,242,073,778.00	2,662,219,521,356.14	111.15	266,977,447,578.14
5	2012	3,398,346,627,815.00	3,633,133,585,206.40	106.91	234,786,957,391.40

Sumber : Dispenda Provinsi Bali dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali (2013).

Jika dilihat pada Tabel Provinsi Bali yang selalu mencapai target setiap tahunnya dan rata pendapatannya melebihi target yang telah dibuat. Pada penelitian ini, ingin melihat bagaimana Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah kota Denpasar yang seperti diketahui kota Denpasar merupakan ibu kota dari pulau seribu pura dan juga sebagai pusat pariwisata di pulau Bali. Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan akan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang masih sangat tinggi oleh daerah terhadap pemerintah pusat.

Dan dapat mengindikasikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengendalikan sumber keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas, ini merupakan problem yang dihadapi di daerah dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian keuangan yang memberikan kemampuan yang besar bagi daerah untuk mengendalikan atau mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pembangunan kota Denpasar yang sangat pesat pada 5 tahun terakhir, dan juga pembangunan sarana prasarana yang dirasakan langsung oleh masyarakat menandakan Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar memiliki peningkatan selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pendapatan kota Denpasar yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan

pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga melihat tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa analisis rasio dan analisis *trend*. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kemandirian dan efektivitas keuangan yang diusulkan Halim (2002). Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Denpasar setiap tahunnya. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah kota Denpasar dalam merealisasikan target penerimaan PAD pada tahun anggaran penelitian (2009-2013). Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah ini dilakukan pada Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2009 sampai tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif.

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka perincian realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat/propinsi, dan pinjaman daerah (jika ada). Data ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa laporan pertanggung jawaban kepala daerah kota Denpasar tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan juga ingin mengetahui Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Rumus untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Penapatan Asli Daerah sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Meiliana; 2014). Rumus untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap Penapatan Asli Daerah sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\text{Total Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Dalam penelitian ini rasio kemandirian dirumuskan (Abdul Halim; 2008) dengan :

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus di atas dapat mengetahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Abdul Halim, 2008 mengkategorikan kemampuan Kemandiria keuangan daerah ke dalam lima tingkat kemandirian

Tabel 2.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD/TPD (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN
<10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30,00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
>50.01	Sangat Baik

Sumber :Abdul Halim (2008)

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2000).

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas.

Tabel 3.
Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 (1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Denpasar, pendapatan pajak daerah tidaklah selalu meningkat melainkan tidak stabil dalam 5 tahun terakhir dan pendapatan pajak daerah dapat dilihat dalam Tabel 4.

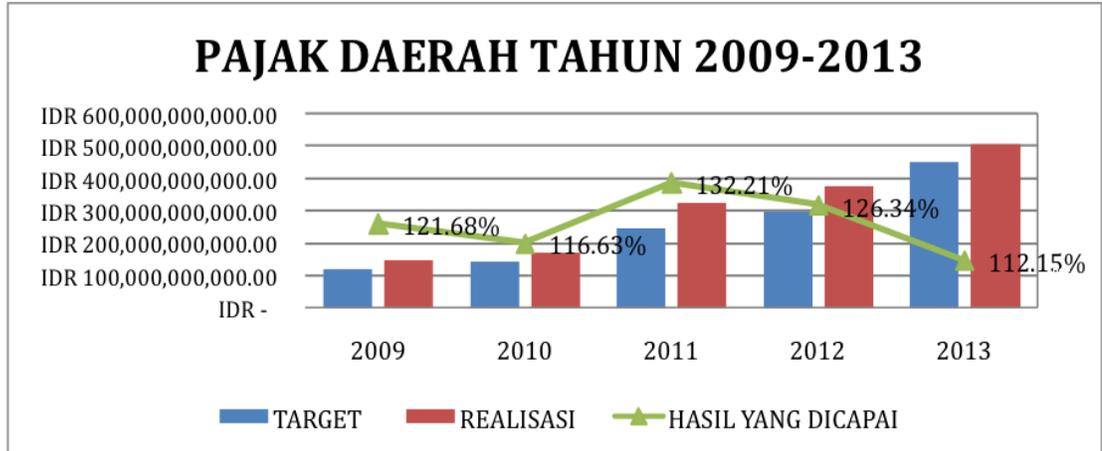
Tabel 4.
Pendapatan Pajak Daerah tahun 2009-2013.

TAHUN	TARGET	REALISASI	HASIL YANG DICAPAI	KONTRIBUSI
2009	IDR 120,050,000,000.00	IDR 146,077,325,516.83	121.68%	67.95%
2010	IDR 145,400,000,000.00	IDR 169,581,465,975.17	116.63%	65.75%
2011	IDR 246,800,000,000.00	IDR 326,282,402,524.07	132.21%	76.78%
2012	IDR 298,600,000,000.00	IDR 377,247,592,363.38	126.34%	73.78%
2013	IDR 450,258,600,000.00	IDR 504,981,564,103.82	112.15%	76.63%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara garis besar pendapatan pajak daerah yang diperoleh oleh kota Denpasar selama 5 tahun terakhir selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi hasil yang dicapai tidak selalu konsisten, bisa dilihat pada Tabel pada tahun 2010 mengalami penurunan hasil sebanyak kurang lebih 2%. Dan pada tahun berikutnya tahun 2011 naik pesat hingga lebih 15%. Pendapatan pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Pendapatan Pajak Daerah 2009-2013.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Jika dilihat dari grafiknya pendapatan pajak daerah di Denpasar tidak selalu berada dalam *track* meningkat. Meningkatnya pajak daerah dapat pula dilandasi karena jumlah wisatawan yang meningkat pada tahun 2011 yang berjumlah 398.025 wisatawan (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kota Denpasar). Jumlah itu merupakan jumlah tertinggi wisatawan yang berkunjung dari 5 tahun terakhir. Namun kadang pula grafik dari pajak daerah menurun. Banyak faktor yang dapat melandasi pendapatan pajak daerah meningkat atau menurun.

Pengaruh situasi politik yang sempat tidak stabil, penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung dan juga banyaknya hotel atau bangunan yang dibangun tapi tidak membayar pajak. Dapat dilihat dalam Tabel setiap tahunnya pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 60% dan bahkan pada tahun 2013 mencapai lebih dari 75% dari total pendapatan asli daerah Denpasar. Dan jika dirata-ratakan pajak

daerah selama 5 tahun terakhir telah menyumbang sekiranya lebih dari 72% dari total pendapatan asli daerah kota Denpasar. Selebihnya disumbangkan oleh pendapatan asli daerah yang lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tak lupa juga tentunya retribusi daerah.

Pada penelitian ini juga peneliti ingin mengetahui besarnya kontribusi Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan retribusi daerah selama 5 tahun terakhir tidak cukup menjanjikan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Pendapatan Retribusi daerah tahun 2009-2013.

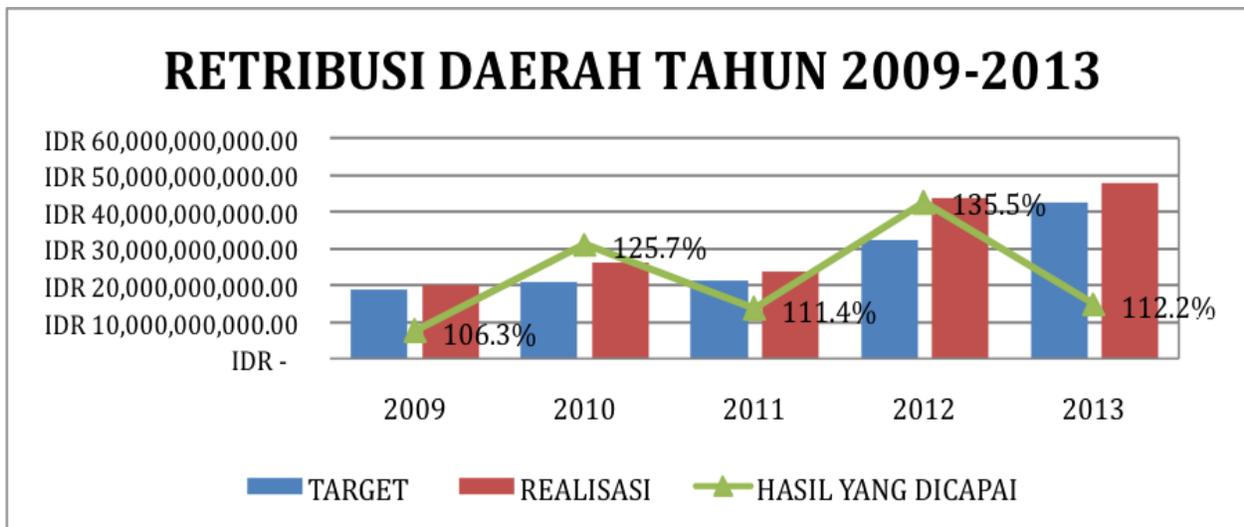
NO	TARGET	REALISASI	HASIL YANG DICAPAI	KONTRIBUSI
2009	IDR 18,936,747,500.00	IDR 20,126,119,187.00	106.3%	9%
2010	IDR 20,833,458,340.00	IDR 26,191,507,819.00	125.7%	10%
2011	IDR 21,498,400,000.00	IDR 23,938,974,520.00	111.4%	6%
2012	IDR 32,313,369,000.00	IDR 43,772,749,610.00	135.5%	9%
2013	IDR 42,685,463,848.00	IDR 47,874,288,091.00	112.2%	7%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Jika dilihat dari hasil yang di dapat, terlihat pendapatan retribusi daerah kota Denpasar belum begitu konsisten setiap tahunnya. Walaupun setiap tahunnya (2009-2013) dapat melampaui target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2011 pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan hasil pencapaian yang mencapai 14% dari tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan retribusi diantaranya

masi banyaknya parkir liar yang terdapat disepanjang jalan kota Denpasar. Tapi selain menurunnya pendapatan retribusi daerah. Kota Denpasar berupaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi kota Denpasar, salah satunya dengan membangun jalan tol Bali Mandara. Tol diatas laut ini merupakan jalan tol buatan anak bangsa sendiri, dan pada tahun 27 sept 2013 baru diresmikan. Dan juga diikutipeluasan bandara Internasional Ngurah Rai guna meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Naik turunnya penapatan retribusi daerah dapat kita lihat pada Gambar 2

Gambar 2.
Pendapatan Retribusi daerah pada tahun 2009-2013.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Jika dilihat dari grafiknya pendapatan retribusi daerah yang paling tinggi terdapat pada tahun 2012 yang mencapai 135,5%. Ini terjadi dikarenakan meningkatnya retribusi perijinan tertentu yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang drastis hingga

mencapai 23%. Ini dapat terjadi karena proyek pembangunan jalan tol sepanjang tahun 2013. Dan diharapkan pendapatan retribusi pada tahun 2014 dapat meningkat kembali karena terdapat fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh para pengendara dan juga jasa-jasa yang lain yang dapat di pakai oleh para masyarakat kota Denpasar tentunya.

Dari perhitungan rasio EKD pada Tabel 6, dengan tahun dasar 2009, maka *trend* efektivitas keuangan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah seperti tampak pada Tabel 6.

Tabel 6.
Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar tahun 2009-2013

NO	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	RASIO EFEKTIVITAS
2009	IDR 138,986,747,500.00	IDR 166,203,444,703.83	119.58%	SANGAT EFEKTIF
2010	IDR 166,233,458,340.00	IDR 195,772,973,794.17	117.77%	SANGAT EFEKTIF
2011	IDR 268,298,400,000.00	IDR 350,221,377,044.07	130.53%	SANGAT EFEKTIF
2012	IDR 330,913,369,000.00	IDR 421,020,341,973.38	127.23%	SANGAT EFEKTIF
2013	IDR 492,944,063,848.00	IDR 552,855,852,194.82	112.15%	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel 6, dapat dijabarkan sebagai berikut. :

- 1) Tabel 6 menunjukkan tingkat Efektivitas keuangan daerah kota Denpasar dalam 5 tahun terakhir mencapai tingkat tertinggi dari Tabel kriteria tingkat Efektivitas Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 (1996), yaitu Sangat Efektif. Dan tetap konsisten pada 5 tahun terakhir.

- 2) Tahun 2011 memiliki *trend* Efektivitas yang paling tinggi dari 5 tahun terakhir yang mencapai angka 130.53% dibandingkan pada tahun 2013 yang memiliki tingkat Efektivitas terendah yang mencapai 112.15%
- 3) Bisa kita lihat juga bahwa kemampuan pemerintah kota Denpasar dalam memobilisasi pendapatan sesuai yang ditargetkan, bahkan pemerintah kota Denpasar setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditetapkan.

Jika dilihat dari grafiknya maka *trend* Efektivitas tampak pada Gambar 3

Gambar 3.

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar tahun 2009-2013.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Dalam grafik terlihat jelas bahwa tingkat efektivitas kota Denpasar tidak selamanya meningkat setiap tahunnya, melainkan tingkat Efektivitas kota Denpasar *relative* tidak stabil dimana pada tahun 2011 merupakan tingkat efektivitas tertinggi yang mencapai hingga 130.53%. Dibandingkan 2 tahun berikutnya yang mengalami penurunan dan mencapai titik rendah hingga mencapai 112.15% pada tahun 2013.

Kemandirian Keuangan daerah otonom kota Denpasar adalah kemampuan keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu penghasilan asli daerah atau PAD. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio KKD seperti tampak pada Tabel 7.

Tabel 7.
Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar tahun 2009-2013.

TAHUN	TOTAL PAD	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PRESENTASE PEROLEHAN	KEMAMPUAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
2009	IDR 214,984,238,096.32	IDR 416,031,829,607.32	51.7%	SANGAT BAIK
2010	IDR 257,901,434,176.85	IDR 503,484,339,825.00	51.2%	SANGAT BAIK
2011	IDR 424,962,652,927.23	IDR 623,873,994,805.18	68.1%	SANGAT BAIK
2012	IDR 511,326,621,036.38	IDR 756,661,367,924.38	67.6%	SANGAT BAIK
2013	IDR 658,970,207,435.78	IDR 831,290,885,107.47	79.3%	SANGAT BAIK

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan rasio kemandirian pada Tabel 7 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.:

- 1) Tidak jauh beda dengan tingkat Efektivitas keuangan daerah. Jika dilihat dari Tabel yang telah tersedia (Tabel 7) tingkat Kemandirian keuangan kota Denpasar selama 5 tahun terakhir (2009-2013) mencapai tingkat tergtinggi dari Tabel kriteria Abdul Halim (2008) tentang tingkat kemandirian keuangan. Yaitu, sangat baik.

- 2) Pada tahun 2013 tingkat kemandirian kota Denpasar mencapai 79.3% yang menandakan bahwa pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah pada tahun 2013 mengalami pemasukan tertinggi dari 5 tahun terakhir. Dan pada tahun 2009 yang menjadi dasar penelitian ini mendapatkan perolehan presentase terendah. Lalu pada tahun berikutnya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan yang berkisar tidak lebih dari 1%.
- 3) Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kota Denpasar telah mendanai sendiri biaya belanja daerahnya dari kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya. Dan ini juga membuktikan bahwa ketergantungan pemerintah kota Denpasar terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) dikatakan rendah. Karena hasil kemandirian yang diperoleh pemerintah kota Denpasar sangat baik.

Selain pada Tabel pada penelitian ini ingin melihat bagaimana grafik kemandirian keuangan pada Gambar 4

Gambar 4.

Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar tahun 2009-2013.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah pemerintah kota Denpasar (Data diolah, 2014).

Berbeda dengan *trend* Efektivitas yang mengalami naik turun dalam 5 tahun terakhir. Pada *trend* kemandirian bisa dilihat (pada Tabel 4) pada 2010 tingkat kemandirian tingkat kemandirian kota Denpasar mencapai titik terendah yaitu 51,2%, dan selebihnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 68,1%. Pada tahun 2012 menurun hanya 0.5% menjadi 67.6% dan selanjutnya pada tahun 2013 mencapai titik tertinggi dari 5 tahun terakhir (2009-2013) hingga 79.3%. Dan ini menandakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah kota Denpasar dalam membiayai pembelanjaan daerah kotanya sendiri dapat tereleasaskan dan juga ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikatakan rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan dan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah merupakan pendapatan atau komponen utama yang dimana setiap tahunnya (2009-2013) pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 60% dan bahkan pada tahun 2013 mencapai lebih dari 75% dari total Pendapatan Asli Daerah Denpasar. Retribusi daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2009-2013 setiap tahunnya retribusi daerah hanya berkontribusi rata-rata sebesar 8% pada Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan Retribusi daerah yang diharapkan sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah dirasa sudah cukup banyak berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Selain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen – komponen lain pada Pendapatan Asli Daerah.

- 2) Tingkat Efektivitas kota Denpasar selama 5 tahun terakhir (2009-2013) selalu berada dalam tingkat sangat efektif berdasarkan implikasi penilaian tingkat Efektivitas (Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 ; 1996) serta tidak ada yang mendapatkan tingkat efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif dengan rasio keungan yang berkisar diatas 100% setiap tahunnya. Tingkat kemandirian kota Denpasar selama 5 tahun terakhir (2009-2013) mendapatkan tingkat kemandirian sangat baik dan bertahan selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Dalam tingkat kemandirian berdasarkan implikasi penilaian Abdul Halim (2008), kota Denpasar selalu dalam tingkat kemandirian yang sangat baik dari tahun 2009-2013. Tidak terdapat tingkat kemandirian yang baik, cukup, sedang kurang bahkan sangat kurang.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, disarankan untuk penelitian selanjutnya mencermati dan menyempurnakan keterbatasan tersebut.

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk kedepannya pemerintah daerah kota Denpasar dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio dan *trend* Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan agar Pemerintah Kota Denpasar lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan retribusi

daerah. Agar pajak daerah tidak menjadi satu-satunya komponen sumber pendapatan utama dari pendapatan asli daerah melainkan retribusi daerah juga dapat membantu agar pendapatan PAD kota Denpasar semakin meningkat.

REFERENSI

- Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Petumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- Bird, Richard, M., and Smart, Michael, 2001. Intergovernmental Fiscal Transfers : Some Lessons from International Experience, International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada
- Dwirandra, A. (2008). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Halim, Abdul. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Edisi 4. Salemba Empat.
- Litvack, Jennie, Seddon, Jessica, at al, 1998, Decentralization Briefing Notes, The World Ban , Washington, D.C
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pariwisata.denpasarkota.go.id/index.php/pencarian/?key=jumlah+wisatawan+tahun+2009-2013. Dinas Pariwisata kota Denpasar.
- Pendapatan.denpasarkota.go.id (2014) data PAD dan PBB kota Denpasar*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.